PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des

2022

Hal.: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Silpa Capai Rp313 Miliar

Rapat Paripurna LKPj Gubernur Kalbar 2021

PONTIANAK - Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 diwarnai berbagai catatan dari wakil rakyat. Sejumlah interupsi disampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Wakil Gubernur Kalbar, H Ria Norsan. Salah satu yang banyak disorot

◆Ke Halaman 7 kolom 1

IST

SERAHKAN DOKUMEN: Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan menyerahkan dokumen LKPj Gubernur kepada pimpinan DPRD Kalimantan Barat, kemarin.

Silpa Capai Rp313 Miliar

Sambungan dari halaman 1

adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 yang mencapai Rp313 miliar.

Wagub Kalbar, Ria Norsan kepada sejumlah awak media mengatakan, dari sisi keuangan memang terjadi silpa yang akumulasinya mencapai 20 persen lebih. "Angka pastinya untuk Silpa APBD 2021 diperkirakan sekitar Rp313 miliar lebih. Sekitar itu angkanya," ucap dia.

Menurut Norsan, munculnya Silpa 2021 dipicu oleh beberapa faktor. Pertama karena anggaran yang dipersiapkan untuk penanganan pandemi Covid-19 ternyata tidak terserap semua. Kemudian ada pula sisa dana lain yang menjadikan kenaikan pada porsi pajak pendapatan.

"Memang di 2021, kami (Pemprov Kalbar) fokus pada pandemi Covid-19. Penyiapan bahan-bahan dan instrumen lain mengacu kepada kebijakan penanganan dan pengentasan Covid-19," ujarnya. Program lain penyebab terjadinya silpa yakni program DAK (Dana Alokasi Khusus) yang banyak tidak terlaksana. Paling banyak berada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sementara untuk OPD di PUPR sebagian besar terlaksana.

"Alasan banyak program tidak terlaksana waktunya terlalu mepet untuk dilakukan. Kalau dipaksakan bisa sengkarut nanti. Bisa repot semua," katanya. Nah, lanjut Norsan, untuk tahun 2022, Pemprov Kalbar optimis dana silpa akan dapat diturunkan dari nilai tahun 2021. Untuk itu, anggaran tahun 2022 secepatnya akan direalisasikan. Proses tender rata-rata sudah dimulai pada OPD-OPD yang memiliki program.

Meski begitu, mantan Bupati Mempawah dua periode ini juga menyebutkan sejumlah pencapaian prestisius dari Pemprov Kalbar.

Pada LKPj APBD Tahun 2021, volume APBD tahun 2021 memang ada penurunan nilai dikarenakan pandemi. Walaupun demikian, ekonomi Kalbar dapat tumbuh dari 1,8 persen menjadi 4,8 persen. Indikator atau capaian prestasi lain pun meningkat. Bahkan, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kalbar ikut naik.

"(Persentase) jalan mantap juga naik. Insya Allah kami perkirakan sampai masa jabatan kami berakhir yakni tahun 2023, status jalan mantap mencapai 80 persen lebih untuk 14 kabupaten dan kota di Kalbar," ucapnya. ***(den)***